

## ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN DANA PENDIDIKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017

Ririh Tia Rutfiana<sup>1✉</sup>, Banatul Hayati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

✉Email: ririhtiarutfiana@students.undip.ac.id

### Abstract

*One of the policies taken by the Indonesian government to improve the quality of human resources is through access to education for the whole community through the allocation of education subsidies. The target of the education subsidy program is to increase the Gross Enrollment Rate (GER). This study focuses on analyzing the influences of the School Operational Assistance program, education budget, Gross Regional Domestic Product Percapita and Gross Enrollment Rate of the previous year (GER(-1)) at the Elementary School, Junior High School and Senior High School. In Regency/City of Central Java Province in 2015-2017. The research is quantitative analysis using Panel Fixed Effect Model (FEM) data estimation. Research results show that at the Elementary School level education budget and GER (-1) have a positive and significant effect on GER. At the Junior High School level, Gross Regional Domestic Product Percapita and GER (-1) has positive significant impact to GER. At Senior High School level, School Operational Assistance program, education budget and Gross Regional Domestic Product percapita has positive significant impact to GER.*

**Keywords:** *Gross Enrollment Rate (GER), School Operational Assistance Program, Gross Regional Domestic Product percapita, Gross Enrollment Rate of the previous year (GER(-1))*

### PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan menyediakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Purwanto (2006) aspek pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Karena melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan sehingga diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Pendidikan juga memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan bukan hanya menentaskan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Todaro (2006) mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Semakin berkualitas pendidikan suatu negara maka semakin maju negara tersebut dan sebaliknya.

Peran modal manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dirasa semakin penting. Perkembangan global saat ini (yang dicatat dalam Millenium Development Goals (MDGs)) juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia sebagai prioritas yang utama. Investasi pendidikan dianggap memiliki implikasi yang positif terhadap penambahan sumber daya bagi perekonomian, sehingga dapat meningkatkan *output* secara umum. Oleh karena itu, perubahan dalam pengeluaran bidang pendidikan yang di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah akan mendukung proses akumulasi dalam modal manusia sehingga pada akhirnya akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi.

Pemberian bantuan atau subsidi dibidang pendidikan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memajukan dan pemeratakan pendidikan di Indonesia. Pemberian subsidi pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat/orang tua siswa dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. jika pemerintah memberikan subsidi atau bantuan pendidikan kepada masyarakat, maka akan meningkatkan jumlah permintaan masyarakat terhadap pendidikan karena dengan adanya subsidi pendidikan secara langsung dapat menurunkan harga pendidikan sehingga daya beli masyarakat terhadap pendidikan akan meningkat. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat adalah pemberian bantuan pendidikan salah satunya adalah pemberian subsidi pendidikan.

BOS adalah bentuk bantuan atau subsidi yang diberikan pemerintah kepada siswa melalui sekolahnya masing-masing. Jadi BOS adalah bentuk subsidi uang yang pengeluarannya tidak langsung diterima target atau sasaran (siswa) tapi melalui sekolah. Program BOS adalah salah satu program pemerintah yang dibiayai dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan SMA. Dalam Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Tahun 2015 disebutkan bahwa ntuk mencapai tujuan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah telah menyiapkan program BOS SMA yang mulai diadakan pada Tahun 2015 dan akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan program BOS SMA ini adalah membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional non-personalia.

Pengaruh program BOS perlu diuji dengan *outcome* yang dihasilkannya. Salah satu *outcome* yang sangat penting menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah tentang Agka Partisipasi Sekolah (APS) atau daya serap pendidikan. Jadi sudah sejauh mana program ini dapat meningkatkan partisipasi warga negara untuk bersekolah atau sejauh mana program ini dapat meningkatkan angka partisipasi warga negara untuk mengenyam pendidikan.

Salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK merupakan rasio jumlah siswa yang bersekolah tanpa melihat kategori umur tertentu (pada jenjang sekolah tertentu di wilayah tertentu dan pada tahun tertentu) terhadap jumlah penduduk pada kategori umur yang tertentu (pada jenjang sekolah, wilayah dan tahun yang sama).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

**Tabel 1**  
**Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD, SMP Dan SMA Sederajat Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015- 2017**

PROVINSI JAWA TENGAH	APK SD			APK SMP			APK SMA		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Kabupaten Cilacap	112,83	108,51	110,73	92,31	91,28	90,41	75,2	80,22	87,28
Kabupaten Banyumas	111,66	111,43	108,82	77,97	90,95	86,79	80,07	85,13	85,43
Kabupaten Purbalingga	118,81	112,87	104,69	85	90,74	92,69	75,29	78,04	72,83
Kabupaten Banjarnegara	106,87	108,39	101,72	92,12	82,58	93,27	83,9	70,98	66,77
Kabupaten Kebumen	109,61	109,57	107,74	93,24	89,72	90,06	86,42	91,98	104,89
Kabupaten Purworejo	112,87	113,41	107,87	79,84	78,56	93,85	82,89	110,14	102,81
Kabupaten Wonosobo	116,45	112,89	107,62	86,55	87,73	89,74	53,23	59,56	52,98
Kabupaten Magelang	116,28	110,03	114,07	90,67	92,79	88,93	69,6	68,68	75,56
Kabupaten Boyolali	110,65	111,04	108,25	91,91	86,64	93,21	93,37	88,88	77,45
Kabupaten Klaten	111,64	108,38	105,14	77,22	99,58	93,4	104,73	94,53	100,58
Kabupaten Sukoharjo	111,02	106,99	101,63	83,84	94,34	99,88	101,17	101,42	96,11
Kabupaten Wonogiri	111,23	105,48	104,85	92,25	92,44	94,52	91,32	92,99	86,58
Kabupaten Karanganyar	111,23	107,13	108,58	91,85	101,59	97,2	94,01	94,32	83,11
Kabupaten Sragen	108,13	111,62	108,01	90,93	83,93	86,42	88,55	100,81	106,49
Kabupaten Grobogan	109,29	106,38	107,24	101,12	95,99	91,73	84,88	78,07	81,28
Kabupaten Blora	101,88	111,96	104,47	91,83	84,36	93,67	99,87	93,12	84,82
Kabupaten Rembang	113,88	112,93	114,4	92,19	94,55	103,87	79,04	80,03	72,05
Kabupaten Pati	116,24	106,32	109,49	93,69	91,85	83,9	76,67	97,02	91,14
Kabupaten Kudus	116,3	117,36	107,55	90,17	79,73	89,3	84,42	107,47	93,35
Kabupaten Jepara	111,62	110,34	109,16	95,44	86,24	88,8	74,51	85,84	87,05
Kabupaten Demak	113,3	116,31	105,94	93,78	87,77	94,93	88,92	84,59	91,7
Kabupaten Semarang	107,51	112,65	110,74	98,82	85,78	86,26	81,98	93,13	78,21
Kabupaten Temanggung	107,37	110,16	110,62	94,74	85,04	85,63	68,42	75,62	70,09
Kabupaten Kendal	110,8	103,38	115,08	90,05	93,07	89,79	99,75	99,27	87,1
Kabupaten Batang	108,41	113,74	109,41	91,33	86,68	92,98	77,32	83,95	73,93
Kabupaten Pekalongan	111,18	108,9	110,47	92,07	91,78	93,14	60,74	72,26	55,13
Kabupaten Pemalang	112,59	107,52	110,26	94,24	87,61	88,25	73,29	74,48	71,38
Kabupaten Tegal	105,84	104,29	108,28	95,22	86,31	85,73	79,46	83,38	75,44
Kabupaten Brebes	106,75	112,74	110,42	91,1	94,12	92,49	65,92	63,88	76,51
Kota Magelang	105	105,22	105,98	88,68	88,58	92,7	90,76	142,19	107,24
Kota Surakarta	103,6	109,8	110,37	89,88	84,81	87,93	100,93	110,64	103,55
Kota Salatiga	100,26	110,67	103,44	99,74	84,6	90,55	83,34	110,35	109,61
Kota Semarang	100,54	101,01	105,85	97,12	102,05	98,85	91,34	95,68	107,82
Kota Pekalongan	110,17	116,78	114,47	104,32	79,95	82,97	81,68	119,17	92,04
Kota Tegal	109,03	113,48	108,44	87,39	70,93	80,79	113,61	103,57	87,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui adanya perbedaan APK antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Nilai APK wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada nilai APK di wilayah Kabupaten untuk semua jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan adanya arus mobilitas anak-anak usia sekolah dari wilayah Kabupaten ke wilayah Kota yang kemungkinan di sebabkan oleh adanya fasilitas, kualitas pendidikan yang lebih baik dan lebih maju di wilayah perkotaan.

Berdasarkan kondisi yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah, yaitu ketimpangan APK antar wilayah Kabupaten dan Kota sebagai akibat perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam pendapatan dan ketersediaan anggaran pendidikan maupun subsidi pendidikan bagi masyarakatnya maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan BOS, anggaran pendidikan, PDRB perkapita dan APK (-1) atau APK tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa nilai APK di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017 cenderung mengalami penurunan baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat, seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah telah mencapai target 100%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA hanya sedikit Kabupaten/Kota yang mencapai nilai APK 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa akses pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada jenjang pendidikan lanjut (SMP dan SMA) belum mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sebenarnya. Dengan kata lain perlu upaya/bantuan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Provinsi Jawa Tengah terhadap pendidikan pada jenjang pendidikan lanjutan. Program BOS dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Program ini menjadi prioritas karena diharapkan dapat mengurangi beban orang miskin dalam membayar iuran sekolah sehingga kesejahteraan mereka meningkat dan sekaligus dapat meningkatkan daya beli masyarakat bidang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA.

**Tabel 2**  
**Total Penggunaan Dana BOS Pada Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017**

Penggunaan BOS	Tahun		
	2015	2016	2017
SD Sederajat	1.120.213.193.318	1.506.293.116.427	872.651.531.137
SMP Sederajat	536.211.049.396	824.385.490.063	560.322.365.303
SMA Sederajat	132.369.087.974	276.094.324.293	218.234.104.385

*Sumber: Bantuan Operasional Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa total penggunaan dana BOS mengalami fluktuasi pada tahun 2015- 2017. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 total penggunaan dana BOS di Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi dibandingkan pada tahun 2015 dan 2017. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan kenaikan APK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi kenaikan APK selain subsidi pendidikan dalam hal ini dana BOS.

Susyanthi (2017) menyatakan bahwa PDRB per kapita merupakan salah satu indikator pembentukan APK. Peran PDRB percapita adalah yang terbesar dalam pembentukan APK dibanding variabel lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada tidaknya program pemerintah, partisipasi masyarakat ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang mereka miliki. Salah satu hal yang menjadi alasan rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pendidikan adalah karena rendahnya pendapatan masyarakat sehingga alokasi dana untuk pendidikan mereka menjadi sangat rendah karena masyarakat biasanya akan lebih fokus pada konsumsi kebutuhan primer.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aziz (2009) juga menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai Angka Partisipasi Sekolah (APK) selain pemberian subsidi pendidikan (dana BOS) dari pemerintah. yaitu anggaran pendidikan, PDB perkapita, dan APK tahun sebelumnya. Anggaran pendidikan dicerminkan oleh kenaikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan berpengaruh positif dalam meningkatkan nilai APK. APK (-1) memberikan pengaruh terhadap kenaikan APK pada tahun yang di teliti bisa karena beberapa hal, bisa karena jumlah siswa yang mendaftar tahun lalu sangat besar atau

karena jumlah anak yang seharusnya lulus tahun lalu tetapi ada sebagian yang tidak lulus dan lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori Permintaan dan Penawaran Pendidikan**

Todaro (2006) mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Semakin berkualitas pendidikan suatu negara maka semakin maju negara tersebut dan sebaliknya.

Tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan barang ataupun jasa ekonomi lainnya Todaro (2006). Dari sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni : (1) harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern dimasa yang akan datang. 2) biaya-biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan atau keluarganya. Sedangkan pada sisi penawaran, jumlah sekolah ditingkat sekolah dasar, menengah dan universitas lebih banyak ditentukan oleh proses politik, yang sering tidak ada kaitannya dengan kriteria ekonomi. tingkat penawaran atau fasilitas sekolah dibatasi oleh tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan.

### **Relevansi Kuat Antara Pendidikan dan Penghasilan Yang Akan Diperoleh Di Masa yang akan Datang.**

Simanjuntak (1985) mempunyai asumsi bahwa seorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah yang dilakukan oleh seseorang sama dengan meningkatnya kemampuan kerja dan tingkat penghasilan orang tersebut, namun pada pihak laini orang tersebut juga menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun karena mengikuti pendidikan disekolahnya dan juga membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, buku-buku, transport dan lainnya.

Bentuk relevansi antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu dengan adanya pendidikan yang semakin berkualitas, maka secara langsung akan menciptakan semakin banyak tenaga kerja yang produktif dan pada kesempatan yang sama menyebar ke seluruh sektor kehidupan sehingga pada gilirannya produktivitas dan *output* yang dihasilkan akan semakin meningkat (Prayitno, 1996).

### **Investasi Modal Manusia (*Human Capital Investment*)**

Becker (1992) keberhasilan ekonomi individu serta keseluruhan ekonomi tergantung pada seberapa luas dan efektif orang berinvestasi dalam diri mereka sendiri serta adanya teknologi dapat menjadi pendorong ekonomi modern, terutama dari sektor teknologi tinggi, tetapi modal manusia merupakan bahan bakarnya. Secara konseptual menurut beberapa ekonom seperti modal manusia didefinisikan sebagai pengetahuan, informasi, ide, keahlian dan kesehatan dari seorang individu.

Sedangkan menurut Mankiw (2008), perkembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Dalam hal ini modal

manusia dapat mengacu pada sektor pendidikan dan sektor lainnya. pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar disuatu wilayah.

### **Pendidikan Sebagai Barang Merit**

Pendidikan merupakan jenis *merit good*, dimana semua orang perlu mendapatkannya, tetapi tidak semua orang dapat memperoleh barang publik ini. Hal ini terjadi, karena untuk mendapatkan pendidikan, membutuhkan biaya atau tarif yang harus dibayarkan sesuai kebijakan penetapan tarif pemerintah, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk pemeratakan pendidikan (Dwiputrianti, 2012)

Pendidikan dikategorikan sebagai barang merit memungkinkan berbagai pihan (pemerintah maupun swasta) dapat menyediakan pendidikan secara lebih optimal dan dalam saat yang bersamaan pemerintah dapat mengontrol segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Baik berupa permintaan dan penawarannya, sarana dan prasarana, harga dan lain-lain.

### **Subsidi Pemerintah**

Subsidi merupakan semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan dan lain-lain.

Pemberian subsidi dibidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk memajukan dan pemeratakan pendidikan di Indonesia. Pemberian subsidi pendidikan dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat/orang tua siswa dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Subsidi biaya pendidikan juga bertujuan untuk membantu biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Tujuan kebijakan program pemberian subsidi biaya pendidikan adalah untuk mewujudkan perluasan akses, pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui proses penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu pada tingkat pendidikan.

### **Gambaran Operasional Variabel Dependen dan Independen**

#### **Angka Partisipasi Sekolah (APK)**

APK adalah rasio jumlah siswa (tanpa melihat umur) yang sedang bersekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Cara menghitung APK adalah dengan rumus :

$$APK_{h}^{t} = \frac{E_{h}^{t}}{P_{h,a}^{t}} \times 100 \quad (1)$$

Keterangan:

h = Jenjang pendidikan

a = Kelompok usia

t = Tahun

$E_{h}^{t}$  = Jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h

$P_{h,a}^{t}$  = Jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

Rumus:

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100 \quad (2)$$

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SMP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100 \quad (3)$$

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SMA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100 \quad (4)$$

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Seringkali ditemukan APK yang lebih dari 100 persen berarti ada murid yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.

#### **Dana BOS**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah penggunaan dana BOS yaitu data penggunaan total dana BOS per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dinyatakan dalam juta rupiah.

Terdapat 11 komponen yang didanai oleh BOS pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sekolah, gaji honorarium bulanan, pembelian dan perawatan alat multi media pembelajaran, serta biaya lainnya jika semua komponen telah terpenuhi pendanaan dari BOS.

#### **Anggaran Pendidikan**

Anggaran Pendidikan merupakan besarnya biaya pendidikan dari pemerintah yang ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah ditingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Anggaran pendidikan mendapatkan alokasi dari APBD yang disajikan dalam satuan juta rupiah. Anggaran pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah total dana pengeluaran biaya pendidikan yang digunakan untuk biaya pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal pendidikan, dan belanja lainnya di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

#### **PDRB Perkapita**

Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertahun. Data yang digunakan adalah PDRB perkapita menurut harga konstan 2010 yang disajikan dalam satuan juta rupiah di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah

#### **APK (-1)**

Tingkat Angka Partisipasi di tahun sebelumnya dapat memberi pengaruh pada APK tahun berjalan. Hal ini dapat dilihat apakah karena faktor-faktor seperti besarnya jumlah siswa baru pada tahun sebelumnya atau karena faktor-faktor negatif seperti besarnya anak yang tidak lulus dan lain-lain. Sehingga dapat melakukan analisa terhadap faktor-faktor tersebut untuk mencari jalan keluar.

#### **Jenis dan Sumber Data**



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data yang terdiri atas sekumpulan subjek penelitian sepanjang periode tertentu (penggabungan antara data *time series* dan *cross section*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet, catatan-catatan, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi data APK, PDRB Perkapita dan APK (-1). Data penggunaan dana BOS bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) . Data anggaran bidang pendidikan diperoleh dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Terdapat lima variabel dalam penelitian ini yaitu satu variabel dependen (terikat) dan empat variabel independen (bebas) yang akan dimasukkan dalam model serta tiga tahun pengamatan yaitu tahun 2015-2017.

Penelitian ini menjelaskan secara khusus tentang pengaruh kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Penelitian ini diungkapkan juga variabel lain (variabel kontrol) yang diduga kuat mempengaruhi naik turunnya APK seperti Anggaran Pendidikan, PDRB perkapita, dan APK (-1) atau APK tahun sebelumnya.

**Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan regresi data panel Model *fixed effect* dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut (Gujarati, 2012) :  $Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{3i} + \beta_4 D_{4i} + \mu_{it}$ . Model empiris penelitian ini dibagi dalam tiga persamaan yang mewakili masing-masing jenjang pendidikan yang diteliti, yaitu jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Model empiris penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$APKSD_{it} = \alpha_i + \beta_1 LOGBOS SD_{it} + \beta_2 LOGAP_{it} + \beta_3 LOG PDRB_{it} + \beta_4 APKSD_{it-1} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (5)$$

$$APKSMP_{it} = \alpha_i + \beta_1 LOGBOS SMP_{it} + \beta_2 LOGAP_{it} + \beta_3 LOGPDRB_{it} + \beta_4 APKSMP_{it-1} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (6)$$

$$APKSMA_{it} = \alpha_i + \beta_1 LOGBOS SMA_{it} + \beta_2 LOGAP_{it} + \beta_3 LOGPDRB_{it} + \beta_4 LOGAPKSMA_{it-1} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (7)$$

Dimana:

- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien regresi variabel 1
- $\beta_2$  = Koefisien regresi variabel 2
- $\beta_3$  = Koefisien regresi variabel 3
- $\beta_4$  = Koefisien regresi variabel 4
- APK SD<sub>it</sub> = Angka Partisipasi Kasar SD tahun sekarang
- APK SMP<sub>it</sub> = Angka Partisipasi Kasar SMP tahun sekarang
- APK SMA<sub>it</sub> = Angka Partisipasi Kasar SMA tahun sekarang
- BOS SD<sub>it</sub> = Penggunaan dana BOS SD tahun sekarang
- BOS SMP<sub>it</sub> = Penggunaan dana BOS SMP tahun sekarang
- BOS SMA<sub>it</sub> = Penggunaan dana BOS SMA tahun sekarang

$AP_{it}$	= Anggaran pendidikan tahun sekarang
$PDRB_{it}$	= PDRB perkapita tahun sekarang
$APKSD_{it-1}$	= Angka Partisipasi Kasar SD tahun sebelumnya
$APKSMP_{it-1}$	= Angka Partisipasi Kasar SMP tahun sebelumnya
$APKSMA_{it-1}$	= Angka Partisipasi Kasar SMA tahun sebelumnya
$\varepsilon$	= <i>Error term</i>
$t$	= periode ke- $t$
$i$	= entitas ke- $i$

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian asumsi klasik pada tiga jenjang pendidikan yaitu pendidikan SD, SMP dan SMA menunjukkan hasil sebagai berikut: berdasarkan deteksi normalitas dari tiga jenjang pendidikan dalam penelitian ini merupakan data yang berdistribusi normal. Pada jenjang pendidikan SD deteksi normalitas memiliki probabilitas sebesar 0,290216, jenjang SMP probabilitas sebesar 0,473504, dan jenjang pendidikan SMA memiliki probabilitas sebesar 0,184229. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas pada ketiga jenjang pendidikan  $>0,05$  sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

Deteksi Heteroskedastisitas pada tiga jenjang pendidikan dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Dengan nilai lebih besar dari 0,05 hasil estimasi deteksi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak mengalami masalah heteroskedastisitas pada semua jenjang pendidikan.

Multikolonieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami Multikolonieritas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independen dalam fungsi linear. Dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variabel. Hasil uji kolerasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala *multicollinearity* dalam model. Karena semua nilai korelasi masing-masing variabel bebas dibawah 80% pada semua jenjang pendidikan.

Deteksi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Dari hasil uji *DW* yang telah dilakukan, didapatkan hasil *Durbin-Watson stat* pada jenjang pendidikan SD sebesar 2,840499, jenjang SMP hasil *Durbin-Watson stat* sebesar 2,614650 dan jenjang SMA didapatkan hasil *Durbin-Watson stat* sebesar 2,860438. Sedangkan  $d_L = 1,2221$  dan  $d_W = 1,7259$ . Karena nilai  $d$  hitung lebih besar dari  $2d_U$  dan lebih kecil dari  $4-d_U$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat gangguan autokorelasi pada semua jenjang pendidikan yang diteliti.

### Tabel 3

**Hasil Uji Chow**

Pendidikan	Cross-section Chi-square		
	Statistic	d.f	Prob
SD	71,121487	34	0,0002
SMP	59,053311	34	0,0049
SMA	93,195947	34	0,0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews

Sebelum menentukan model regresi Fixed Effect dilakukan terlebih dahulu uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan hasil dari uji *Likelihood Ratio Test* maka dapat disimpulkan bahwa model yang lebih bagus adalah *Fixed effect*. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari nilai probabilitas *Chi-square* yang menunjukkan lebih kecil dari nilai signifikansi 5% yaitu 0,0000 pada jenjang pendidikan SD, *Chi-square* sebesar 0,0049 pada jenjang dan *Chi-square* sebesar 0,0000 pada jenjang pendidikan SMA. sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hausman**

Pendidikan	Cross-section random		
	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq d.f	Prob
SD	25,382600	4	0,0000
SMP	16,617036	4	0,0023
SMA	66,973699	4	0,0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews

Hasil pengujian dengan uji *Hausman* nilai probabilitas *Chi-Square* pada jenjang pendidikan SD adalah 0,0000, jenjang pendidikan SMP nilai probabilitas *Chi-Square* adalah 0,0023 dan jenjang pendidikan SMA nilai probabilitas *Chi-Square* adalah 0,0000 ( $< 0,05$ ) artinya H0 ditolak. Dengan demikian Ha diterima, maka menurut uji *Hausman* model yang tepat untuk uji data panel tiga jenjang pendidikan ini adalah *Fixed Effect Model*.

**Tabel 5**  
**Hasil Estimasi Fixed Effect Model**

Variabel	Hasil Estimasi Fixed Effect								
	SD			SMP			SMA		
	Coeff	t-Stat	Prob.	Coeff	t-Stat	Prob.	Coeff	t-Stat	Prob.
C	163,8697	2,295411	0,0249	351,1519	4,145433	0,0001	828,3783	4,946039	0,0000
LOGBOS	0,183547	0,273252	0,7855	-0,332584	-0,583250	0,5752	1,912318	2,897669	0,0051
LOGAP	0,758819	8,157160	0,0000	0,220924	0,472904	0,6378	2,131120	9,059474	0,0000
LOGPDRB	-3,465953	-0,719700	0,4743	1,885733	3,225938	0,0020	50,27720	4,291428	0,0001
APK(-1)	0,149458	2,250598	0,0277	0,162998	3,005663	0,0037	0,098855	1,632952	0,1072
R-Square	0,946090			0,813528			0,958314		
DW Stat	2,863149			2,351804			2,924413		

Sumber : Hasil Olah Data Eviews

$$APKSD_{it} = 163,8697 + 0,183547LOGBOSSD + 0,758819LOGAP - 3,465953LOGPDRB + 0,149458APKSD(-1) \dots \dots \dots (8)$$

$$APK SMP_{it} = 351,1519 - 0,332584LOGBOS SMP + 0,220924LOGAP + 18,85733LOGPDRB + 0,162998 APKSMP(-1) \dots \dots \dots (9)$$

$$APK SMA_{it} = 828,3783 + 1,912318LOGBOS SMA + 2,131120LOGAP + 50,27720LOGPDRB + 0,098855 APKSMA(-1) \dots \dots \dots (10)$$

### Uji Simultan (Uji F)

Pengujian signifikansi parameter digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan di dalam model. Uji F digunakan sebagai uji signifikansi model secara serentak. Nilai F-tabel *degree of freedom for numerator* (dfn) yaitu 4, berasal dari  $(k-1=5-1)$  sedangkan *degree of freedom for denominator* (dfd) yaitu 30  $(n-k=35-5)$  sehingga diperoleh F tabel = 5,75 dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Hasil estimasi jenjang pendidikan SD menunjukkan nilai F-Statistik sebesar 30,48 dengan probabilitas  $0,000000 < 0,05$  dan F tabel sebesar 5,75 dimana F-statistik  $>$  F tabel  $(30,48 > 5,75)$  dengan taraf keyakinan 95 persen.

Hasil estimasi pada jenjang pendidikan SMP menunjukkan nilai F-Statistik sebesar 7,58 dengan probabilitas  $0,000000 < 0,05$  dan F tabel sebesar 5,75 dimana F-statistik  $>$  F tabel  $(7,58 > 5,75)$ . Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA hasil estimasi menunjukkan nilai F-Statistik sebesar 39,93 dengan probabilitas  $0,000000 < 0,05$  dan F tabel sebesar 5,75 dimana F-statistik  $>$  F tabel  $(39,93 > 5,75)$  dengan taraf keyakinan 95 persen.

### Uji Parsial (Uji t)

Setelah dilakukan pengujian signifikansi parameter secara serentak, tahapan selanjutnya adalah melakukan uji *t*. Pengujian ini digunakan sebagai uji spesifikasi model secara parsial. Dengan taraf keyakinan 95%  $(\alpha = 0,05)$ . Analisis hasil regresi jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa variabel BOS memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,183547 dan nilai probabilitas sebesar 0,7855. Variabel Anggaran Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,758819 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Variabel PDRB Perkapita memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 3,465953 dan nilai probabilitas sebesar 0,4743. Sedangkan variabel APK (-1) memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,149458 dan nilai probabilitas sebesar 0,0277.

Analisis hasil regresi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan bahwa variabel BOS memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar -0,332584 dan nilai probabilitas sebesar 0,5752. Variabel Anggaran Pendidikan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,220924 dan nilai probabilitas sebesar 0,6378. Variabel PDRB Perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 18,85733 dan nilai probabilitas sebesar 0,0020. Sedangkan variabel APK (-1) memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,162998 dan nilai probabilitas sebesar 0,0037.

Analisis hasil regresi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menunjukkan bahwa variabel BOS memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan

nilai koefisien sebesar 1,912318 dan nilai probabilitas sebesar 0,0051. Variabel Anggaran Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 2,131120 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Variabel PDRB Perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 50,27720 dan nilai probabilitas sebesar 0,0001. Sedangkan variabel APK (-1) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,098855 dan nilai probabilitas sebesar 0,1072.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap APK. Pada jenjang pendidikan SD sumbangan pengaruh variabel LOGBOS SD, LOGAP, LOGPDRB dan APKSD(-1) secara bersama-sama sebesar 0,915051 Hal ini menunjukkan bahwa 91,5% variasi dalam variabel terikat mampu dijelaskan oleh semua variabel bebas yang terdapat dalam model, sedangkan sisanya sebesar 8,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

Pada jenjang pendidikan SMP variabel LOGBOS SMP, LOGAP, LOGPDRB dan APKSMP(-1) secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap Y sebesar 0,706166. Hal ini menunjukkan bahwa 70,6% variasi dalam variabel terikat mampu dijelaskan oleh semua variabel bebas yang terdapat dalam model, sedangkan sisanya sebesar 29,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

Pada jenjang pendidikan SMA variabel LOGBOS SMA, LOGAP, LOGPDRB dan APKSMA(-1) secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap APK sebesar 0,934313. Hal ini menunjukkan bahwa 93,4% variasi dalam variabel terikat mampu dijelaskan oleh semua variabel bebas yang terdapat dalam model, sedangkan sisanya sebesar 6,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. Nilai *adjusted R-Square* tersebut menunjukkan bahwa model penelitian baik digunakan.

### **Pengaruh Dana BOS terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Hasil dari estimasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) memiliki hubungan positif dan tidak signifikan antara dana BOS dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan antara dana BOS dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki hubungan positif dan signifikan antara dana BOS dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Hal ini berarti bahwa dengan pemerintah memberikan subsidi atau bantuan pendidikan kepada masyarakat, maka akan meningkatkan jumlah permintaan masyarakat terhadap pendidikan karena dengan adanya subsidi pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) secara langsung dapat menurunkan harga pendidikan sehingga daya beli masyarakat terhadap pendidikan akan meningkat. Sedangkan subsidi pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpengaruh mengurangi beban biaya pendidikan namun tidak mempengaruhi kenaikan permintaan pendidikan pada jenjang tersebut.

### **Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Hasil dari estimasi pada penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara Anggaran Pendidikan dan Angka Partisipasi Kasar (APK) baik pada jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA. Pada jenjang pendidikan SD anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anggaran pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK). Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Hasil estimasi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara anggaran pendidikan dan Angka Partisipasi Kasar (APK) telah sesuai dengan tujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menyatakan bahwa anggaran fungsi pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang mendorong percepatan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan (dalam hal ini adalah Angka Partisipasi Sekolah). Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhierianto Rahmat (2014) yang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan anggaran pada sektor pendidikan dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

#### **Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang berbeda terhadap angka partisipasi kasar (APK) pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) PDRB Perkapita memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan APK. Pada jenjang pendidikan SMP dan SMA PDRB Perkapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai angka partisipasi kasar (APK). Hal ini dapat diartikan bahwa pada jenjang pendapatan SD rata-rata pendapatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan. Tetapi pada jenjang pendidikan tingkat lanjut yaitu SMP dan SMA penelitian ini mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan yang lebih tinggi membutuhkan biaya atau anggaran yang lebih besar sehingga perlu peningkatan kemampuan bayar dari masyarakat (PDRB Perkapita) yang lebih tinggi.

#### **Pengaruh APK Tahun Sebelumnya terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Variabel  $APK(-1)$  adalah untuk menggambarkan bahwa disamping faktor-faktor eksternal (diluar APK) yang mempengaruhi naik turunnya APK juga ada faktor internal yang mempengaruhi perhitungan APK itu sendiri yaitu  $APK(-1)$ .

Hasil estimasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $APK(-1)$  memiliki pengaruh yang positif terhadap angka Partisipasi Kasar (APK). Pada jenjang pendidikan SD dan SMP tingkat  $APK(-1)$  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan APK. Sedangkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hasil estimasi menunjukkan bahwa  $APK(-1)$  memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan APK. Sehingga dapat disimpulkan seperti pada penelitian Aziz (2009),  $APK(-1)$  memiliki pengaruh positif terhadap APK Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena jumlah siswa yang diterima pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang tinggi

sementara jumlah anak yang lulus juga naik dan jumlah siswa yang diterima biasa saja tetapi jumlah penduduk pada usia tersebut menurun misalnya karena terjadi urbanisasi, transmigrasi, penyakit yang mematikan dan lain-lain.

## KESIMPULAN

Pengaruh pemberian dana pendidikan BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA. Hal ini berarti dana BOS di Jawa Tengah berhasil menurunkan harga pendidikan di tingkat SMA sehingga permintaan pendidikan di jenjang SMA meningkat yang dicerminkan oleh naiknya APK. Anggaran pendidikan juga berpengaruh dalam peningkatan nilai APK hal ini berarti alokasi anggaran pendidikan membantu kelancaran proses belajar mengajar dan membantu pemenuhan biaya untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. PDRB perkapita terbukti mampu mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam bidang pendidikan pada jenjang pendidikan lanjutan setingkat SMP dan SMA.

Implikasi dari temuan tersebut adalah kebijakan pemberian dana BOS perlu dipertahankan terutama untuk jenjang pendidikan SMA. Demikian juga porsi anggaran pendidikan perlu dipertahankan dan jika memungkinkan ditambahkan untuk membiayai kegiatan operasional maupun biaya pegawai, biaya barang dan jasa serta biaya modal. Perlu adanya upaya peningkatan PDRB perkapita untuk mendorong masyarakat dalam permintaan pendidikan pada jenjang pendidikan lanjutan setingkat SMP dan SMA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. (2009) . *Pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Departemen Pendidikan Nasional Terhadap Angka Partisipasi Kasar: 2006-2008*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2017. *Angka Partisipasi Kasar 2006-2017*. Semarang : Badan Pusat Statistik.
- Becker, Gary S. *The Economic Approach to Human Behavior*. University of Chicago Press. 1985
- Dwiputrianti, Septiana. (2012). *Kebijakan Penetapan Tarif Barang Publik dan Swasta. Bandung*. STUA LAN Bandung Press.
- Gujarati, Damodar N. Dawn C. Porter. (2010) . *Basic Econometrica. Fifth Edition*. New York : Mc Graw Hill.
- Mankiw, N Gregory. (2008). *Makroekonomi Edisi Ketujuh*. Jakarta : Erlangga.
- Prayitno Hadi. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Purwanto, Nurtanio Agus, Sudiyono dan Mada Sutapa,. 2009. *Dampak Regrouping Sekolah Dasar Kasus SD Pakem 1 di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*. Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian>
- Simanjuntak, J. Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Susyanthi, Richa. (2017) . *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan PDRB Per Kapita Terhadap APK Pada Jenjang SMA Sederajat Di Kabupaten Lampung Timur*. Lampung.
- Todoaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006 . *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga